

DAFTAR ISI

Catatan Redaksi	iii
Abstrak	v
Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN <i>Mutti Anggitta</i>	1-21
Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara <i>Community Policing</i> dan Vigilantisme <i>Rafi Damar Bungsadewo, Nabila Indah Chairunnisa, Shofiyah Adila Farhana</i>	23-42
Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia <i>Dyah Makutaning Dewi, Dewi Widyawati</i>	43-66
Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal <i>Prayudi</i>	67-84
Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan semasa Pemerintahan Joko Widodo <i>Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari</i>	85-103
Pedoman Penulisan	

CATATAN REDAKSI

Jurnal *Politica* pada edisi Mei 2021 menyajikan 5 (lima) artikel yang secara spesifik membahas topik-topik yang terkait dengan isu-isu strategis Indonesia, baik di bidang politik dalam negeri maupun hubungan internasional, baik dari hasil penelitian maupun hasil kajian.

Artikel pertama dengan judul “Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN” yang ditulis oleh Mutti Anggita menganalisis tentang karakteristik gerakan ICAN yang mendunia berkat delapan strategi yang digunakan yaitu letak kantor pusat yang strategis, internet dan teknologi, hubungan dengan pemerintah, jejaring LSM, sorotan selebriti, pemilihan waktu yang tepat, kreativitas, dan kemampuan merespons. Penulis menjelaskan bagaimana ke-delapan strategi tersebut digunakan oleh ICAN dalam kegiatan internasionalnya. Dalam mengevaluasi argumen tersebut, penulis memaparkan data dengan menggunakan metode process tracing dan melakukan analisis arsip untuk memeriksa secara detail peristiwa-peristiwa penting aktivitas ICAN sejak didirikan pada 2007 hingga diadopsinya Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada 2017. Analisis dalam artikel ini juga mencakup tinjauan pustaka tentang gerakan sosial melawan senjata nuklir. Di bagian akhir tulisan, penulis mengidentifikasi lima pencapaian utama yang diraih oleh ICAN.

Artikel kedua berjudul “Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara *Community Policing* dan *Vigilantisme*” yang ditulis oleh Rafi Damar Bungsadewo, Nabila Indah Chairunnisa dan Shofiyah Adila Farhana. Artikel ini menganalisis tentang upaya pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan masyarakat melalui pembentukan kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai elemen pengamanan swakarsa. Akan tetapi, trauma masyarakat tentang Pam Swakarsa tahun 1998 yang kerap dilekatkan dengan pasukan yang tidak terikat hukum dan sumber dari pelaku-pelaku pelanggaran HAM, menjadi halangan terbesar untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Padahal sebelum lahirnya Pam Swakarsa tahun 1998, pengamanan sukarela telah melekat menjadi kultur di dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan. Karenanya, menjadi tantangan bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan pengamanan sukarela sesuai kultur bangsa Indonesia agar terhindar dari terjadinya kekerasan sosial dan politik antara pelaksana pengamanan swakarsa dengan masyarakat sipil yang bertentangan dengan asas Indonesia sebagai negara hukum.

Artikel ketiga berjudul “Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia” ditulis oleh Dyah Makutaning Dewi dan Dewi Widyawati. Kedua penulis berpendapat bahwa adanya internet yang merupakan media informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media internet. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian di 17 provinsi di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan data dari Biro Pusat Statistik Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, kedua penulis berpendapat bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di kawasan Barat Indonesia. Melalui pembangunan infrastruktur, pelatihan dan sebagainya, pemerintah disarankan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung dan meningkatkan pengguna internet. Selain itu perlu sosialisasi mengenai demokrasi agar masyarakat turut aktif dan berdemokrasi di Indonesia.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Prayudi dengan judul “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal”. Didalam tulisannya, penulis menyebutkan bahwa pemilu serentak merupakan salah satu muatan dari draft rancangan revisi UU Pemilu yang dilakukan oleh DPR setelah keluarnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Salah satu muatannya adalah gagasan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tulisan ini menggunakan teori demokrasi yang tertanam untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari pentingnya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam pemilu serentak. Faktor-faktor tersebut antara lain pola politik kekuasaan dan partisipasi masyarakat, kehidupan partai politik, landasan suprastruktur pemerintahan, dan hubungan pusat-daerah serta peluang dan tantangan sentiment pemilih itu sendiri. Diakhir bahasannya, penulis berpendapat bahwa pemilu lokal yang dipisah penting dipertimbangkan bagi penyelenggaraan agenda pemilu serentak di Indonesia sesudah pemilu 2024 mendatang.

Artikel terakhir berjudul “Respons Indonesia terhadap Sengketa Laut China Selatan semasa Pemerintahan Joko Widodo” ditulis oleh Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari. Tulisan ini menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan dan respons Indonesia di tengah dinamika Laut China Selatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk kepentingan analisis, metode yang digunakan adalah kualitatif karena fenomena yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai sumber data, sedangkan teori yang digunakan adalah kepentingan nasional, serta geopolitik dan geostrategi. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan antara lain meliputi mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara. Dalam merespons dinamika yang terjadi di Laut China Selatan, pemerintah Joko Widodo menggunakan pendekatan diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan masukan terhadap semua artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seksi editor yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya penerbitan jurnal ini. Kami berharap kelima artikel dalam Jurnal ini, akan berguna bagi pengayaan informasi kepada semua pihak yang membutuhkannya.

Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2021
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Mutti Anggitta

Understanding Strategies of Anti-Nuclear Movement: A Study of ICAN

This article argues that the most unique characteristic of the ICAN's activism is its transnational scope, which was made possible by the use of eight strategies by the organization including geostrategic headquarters, internet and technology, government relations, NGOs connection, celebrity spotlight, perfect timing, creativity, and responsiveness. In evaluating the argument, this article provides evidence by employing process-tracing methods and conducting archival analysis to closely examine the historical timeline of important events or moments surrounding the ICAN's activism since its inception in 2007 to the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in 2017. This article first provides a literature review on social movements against nuclear weapons to provide some background. It then describes how the eight strategies are employed by the ICAN as they are reflected in its transnational activism. It finally notes the five key milestones that are achieved by the organization.

Keywords: Nuclear Weapons; Nuclear Zero; Social Movement; ICAN; Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Mutti Anggitta

Memahami Strategi Gerakan Anti-Nuklir: Sebuah Studi Tentang ICAN

Artikel ini berargumen bahwa karakteristik paling unik dari aktivisme ICAN adalah jangkauannya yang bersifat transnasional, yang dicapai berkat penggunaan delapan strategi mencakup letak kantor pusat yang strategis, internet dan teknologi, hubungan dengan pemerintah, jejaring LSM, sorotan selebriti, pemilihan waktu yang tepat, kreativitas, dan kemampuan merespon. Dalam mengevaluasi argumen tersebut, artikel ini memaparkan data dengan menggunakan metode process tracing dan melakukan analisis arsip untuk memeriksa secara detail peristiwa-peristiwa penting seputar aktivisme ICAN sejak didirikan pada 2007 hingga diadopsinya Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada 2017. Artikel ini menyediakan tinjauan pustaka tentang gerakan sosial melawan senjata nuklir untuk menjelaskan latar belakang isu ini. Kemudian artikel ini menjelaskan bagaimana delapan strategi tersebut digunakan oleh ICAN, sebagaimana tercermin dalam aktivisme transnasionalnya. Di akhir, artikel ini mengidentifikasi lima pencapaian utama yang diraih oleh ICAN.

Kata Kunci: Senjata Nuklir; Nuclear Zero; Gerakan Sosial; ICAN; Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Rafi Damar Bungsadewo, Nabila Indah Chairunnisa, Shofiyah Adila Farhana

Controversy surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): a Dilemma Between Community Policing and Vigilantism

Currently, the issue of civil security forces Pam Swakarsa has been raised in public discourse and becomes the Indonesian National Police's primary program as an effort to implement community policing, a paradigm that emphasizes partnership between national police and the community as an element of voluntary security. However, the bad reputation of Pam Swakarsa in 1998 as a group of lawless vigilantes behind some of the human rights violations has posed a challenge for the police to revive Pam Swakarsa. The Indonesian Pasukan Pengamanan Swakarsa, better known as Pam Swakarsa, played an important role in securing the Special Session of the People's Consultative Assembly (MPR RI) in 1998. Historically, prior to the formation of Pam Swakarsa, voluntary security forces had been attached to the culture of the community as part of its endeavor to maintain independence as soldiers and defense lines. The current upcoming challenge for the National Police of the Republic of Indonesia is to revitalize the concept of voluntary security through PAM Swakarsa that makes no room for social and political violence the group's members and civilians without going through the proper judicial process, which goes against the values of patriotism, as well as the principles of Indonesia as a state based on the rule of law.

Keywords: Pam Swakarsa; Voluntary Security; Civil Society; Police of the Republic of Indonesia; the State of Law.

Rafi Damar Bungsadewo, Nabila Indah Chairunnisa, Shofiyah Adila Farhana

Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema antara Community Policing dan Vigilantisme

Saat ini, tajuk mengenai Pam Swakarsa kembali diangkat ke permukaan dan dijadikan sebagai program andalan Polri sebagai usaha untuk mengimplementasikan paradigma community policing atau paradigma kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai elemen pengamanan swakarsa. Akan tetapi, momok dari Pam Swakarsa pada tahun 1998 yang kerap dilekatkan dengan pasukan yang tidak terikat hukum dan sumber dari pelaku-pelaku pelanggaran HAM, menjadi halangan terbesar di dalam badan kepolisian untuk menghidupkan kembali Pam Swakarsa di tengah-tengah masyarakat. Pasukan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa pernah memainkan peran penting di dalam mengamankan Sidang Istimewa MPR RI yang diselenggarakan pada tahun 1998 silam. Secara historis, sebelum terbentuknya Pam Swakarsa, pasukan pengamanan sukarela telah melekat menjadi kultur di dalam masyarakat sebagai bagian dari unsur masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai laskar-laskar dan barisan-barisan pertahanan. Menjadi tantangan selanjutnya bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk menciptakan konsep pengamanan sukarela Pam Swakarsa yang tidak membuka peluang bagi terjadinya kekerasan sosial dan politik antara unsur-unsur di dalam Pam Swakarsa dengan masyarakat sipil tanpa melalui proses hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan serta bertentangan dengan asas Indonesia sebagai negara hukum.

Kata kunci: Pam Swakarsa; Pengamanan Sukarela; Masyarakat Sipil; Kepolisian Republik Indonesia; Negara Hukum.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Dyah Makutaning Dewi, Dewi Widyawati

The Role of the Internet in Improving Democratic Development in Western Indonesia

Guaranteed freedom of the press has become an absolute requirement for democratization in Indonesia. Following the 1998 Reform in Indonesia, the press is no longer under the pressure and control of the state. The Indonesia Democracy Index is an index that describes the dynamics of democracy in Indonesia. The developing democratization is further supported by massive development in technology and information. In describing the level of development of information and communication technology, an index is used as a standard measure for information and communication technology development in an area called the Information and Communication Technology Development Index. Of the 11 indicators that make up the index, the fastest growing indicator is the percentage of households with internet access. The availability of internet as a medium of information and communication has encouraged the public to voice their aspirations through different online platforms. The research employs multiple linear regression method. The data used is sourced from Statistics Indonesia and cover 17 provinces in the Western Region of Indonesia. The results showed that the percentage of households accessing the internet and the percentage of poor people had a positive and significant effect on the Indonesian Democracy Index in western Indonesia. Supported by efforts such as improving the development of infrastructure, training, and other measures, it would be on the government's best interest to work with different parties to support and increase the number of internet users. Moreover, more public education on the importance of democracy is also necessary to ensure higher public participation in democracy.

Keywords: Indonesia Democracy Index; Internet; Western Indonesia

Dyah Makutaning Dewi, Dewi Widyawati

Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia

Jaminan terhadap kebebasan pers telah menjadi syarat mutlak bagi upaya demokratisasi di Indonesia. Setelah terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, tidak terjadi lagi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan suatu indeks yang menggambarkan dinamika demokrasi di wilayah Indonesia. Demokratisasi yang semakin berkembang ini didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Dalam menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat suatu indeks sebagai ukuran standar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dinamakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari 11 indikator penyusun indeks tersebut, indikator yang berkembang pesat yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses internet. Adanya internet yang merupakan media informasi dan komunikasi, mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media internet. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik meliputi 17 provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Barat Indonesia. Melalui berbagai langkah seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan sebagainya, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung dan meningkatkan pengguna internet. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai demokrasi sehingga masyarakat turut aktif dalam berdemokrasi di negeri ini.

Kata Kunci: Indeks Demokrasi Indonesia; Internet; Kawasan Barat Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prayudi

Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections

The concurrent elections became one of the agendas in the preliminary revised draft of the General Elections Bill by the Indonesian House of Representatives following Decision of Constitutional Court Number: 55/PUU-XVII/2019. One of the agendas proposed in revised bill was the separation between the national and local elections. The article uses the theory of embedded democracy to further identify several factors that underlie the importance of separating national and local elections in the concurrent election agenda. The relevant factors that come into play include political patterns of power and public participation, political party dynamics, the foundation of government superstructure, national-local government relations, as well as the advantages and drawbacks of voters' personal sentiments. The substance of embedded democracy theory, as shown by the aforementioned factors, suggests that separation between national and local elections should be considered in the organization of the concurrent elections in Indonesia after the upcoming 2024 elections.

Keywords: Concurrent Election Agenda; National Election; Local Election; Presidential System; Regional Election Delay.

Prayudi

Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Agenda pemilu serentak menjadi salah satu muatan dari draft rancangan revisi UU Pemilu yang dilakukan oleh DPR setelah keluarnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Salah satu muatan agenda tadi adalah gagasan yang mencoba untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Tulisan ini menggunakan teori demokrasi yang tertanam guna mengidentifikasi lebih lanjut beberapa faktor yang mendasari pentingnya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam agenda pemilu serentak. Beberapa faktor dimaksud yaitu pola politik kekuasaan dan partisipasi masyarakat, kehidupan partai politik, landasan suprastruktur pemerintahan, dan hubungan pusat-daerah, serta peluang dan tantangan sentimen pemilih itu sendiri. Substansi demokrasi tertanam teoritik sebagaimana ditunjukkan oleh faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa skema pemilu nasional dan pemilu lokal yang dipisah, kiranya penting dipertimbangkan bagi penyelenggaraan agenda pemilu serentak di Indonesia sesudah Pemilu 2024 mendatang.

Kata kunci: Agenda Pemilu Serentak; Pemilu Nasional; Pemilu Lokal; Sistem Presidensial; Penundaan Pilkada.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari

Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration

Indonesia has been "dragged along" in the South China Sea dispute since 2010 after China claimed the Indonesian Exclusive Economic Zone in the northern region of the Natuna Islands. China's unilateral claims continued and peaked in 2016 when Chinese fishing boats carried out illegal fishing in the Natuna waters. China's assertive actions are intersecting with Indonesia's national interest, prompting the Indonesian government to secure its national interest in the Natuna waters despite Indonesia being a non-claimant state in the dispute. The study aims to analyze Indonesia's national interests in the South China Sea region and its responses amidst the dynamics of the South China Sea dispute during the reign of President Joko Widodo. A qualitative method and concepts of national interest, geopolitics, and geostrategy are applied to analyze the study. The results of the study show that Indonesia's national interests include maintaining territorial sovereignty, sovereign rights for exploring and exploiting natural resources, as well as maintaining regional stability in the North Natuna Sea. Indonesia's responses under Joko Widodo's administration, in facing the South China Sea dynamics are exercised through diplomatic endeavours and military power deployments.

Keywords: Dispute; South China Sea; Indonesia; Geopolitic; Geostrategy

Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari

Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo

Indonesia mulai "terseret" dalam sengketa Laut China Selatan sejak 2010, setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Tindakan asertif Tiongkok tersebut bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Natuna meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang bersengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan dan respons Indonesia di tengah dinamika Laut China Selatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan antara lain mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, respons Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut China Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer.

Kata Kunci: Sengketa; Laut China Selatan; Indonesia; Geopolitik; Geostrategi